

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas suatu perusahaan akan senantiasa berubah dan berkembang seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Tuntutan perubahan dan peningkatan kinerja perusahaan dapat memunculkan resiko bagi perusahaan. Hal ini menuntut perusahaan untuk melakukan perancangan manajemen resiko. Resiko dapat timbul dimana saja di dalam perusahaan, dalam proses, aktivitas, dan keuangan. maka dari itu dalam rangka meminimalisir resiko-resiko yang dapat mengakibatkan dampak buruk dalam perusahaan penting bagi perusahaan memastikan bahwa manajemen resiko berjalan dengan efektif. Hal ini tidak terlepas dari peran perancangan Audit Berbasis Resiko. Perkembangan peran Audit Berbasis Resiko dari dulu hingga sekarang mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman.

Telah terjadi pergeseran pemikiran yang pada awal Audit Berbasis Resiko berperan sebagai pengawas pada setiap kegiatan perusahaan namun sekarang Audit Berbasis Resiko juga berpegan sebagai bagian dalam perusahaan. Maka dari itu perlunya digunakan audit berbasis resiko oleh perusahaan. Firmansyah (2013: 3) menyatakan bahwa Audit Berbasis Resiko adalah audit yang difokuskan atau di prioritaskan pada resiko bisnis dan prosesnya serta pengendalian terhadap resiko yang dapat terjadi. Pada dasarnya semakin tinggi resiko suatu area maka harus semakin tinggi pula perhatian audit dalam area tersebut, dengan digunakannya Audit Berbasis

Resiko perusahaan dapat melihat dimana potensi dalam perusahaan yang dapat menimbulkan adanya resiko. Jika dulunya Audit Berbasis Resiko bertujuan menungkap fakta atau temuan kesalahan maka dengan Audit Berbasis Resiko kini dapat melakukan antisipasi sebelum kesalahan benar-benar terjadi. Asri (2016 : 2) menyatakan Konsep Audit Berbasis Resiko secara umum adalah semakin besar resiko semakin besar perhatian yang harus diberikan apabila perusahaan menggunakan pendekatan audit berdasarkan resiko dengan baik dan sebagaimana mestinya. Terdapat tiga aspek dalam Audit Berbasis Risiko (ABR), yaitu penggunaan faktor risiko (*risk factor*) dalam perencanaan audit (*audit planning*), identifikasi *independent risk & assesment* dan partisipasi dalam inisiatif *management & processes risk*. Cakupan dari ABR termasuk dilakukannya identifikasi atas *inherent business risk* (risiko bawaan bisnis) dan *control risk* (risiko pengendalian) yang potensial.

Perancangan Audit Berbasis Resiko merupakan tahap yang utama dan penting dalam suatu proses meminimalisir adanya resiko dalam perusahaan. Namun ada perusahaan yang belum menerapkan Audit Resiko yang memadai sehingga *control* perusahaan terhadap resiko menjadi berkurang. Apabila sebuah perusahaan tidak memiliki control dalam resiko pada suatu area maka akan menimbulkan resiko tersebut dapat berkembang, resiko dalam perusahaan ada berbagai macam salah satunya adalah *Fraud*. Istilah *fraud* dalam lingkungan bisnis memiliki arti yang lebih khusus, yaitu kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva Perusahaan, atau memanipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Dalam istilah akuntansi, *fraud* juga biasa dikenal dengan kejahatan berkerah putih (*white collar crime*), penggelapan uang, dan

bertentangan dengan peraturan. Tindakan fraud dapat dicegah melalui langkah-langkah pencegahan atau penangkalan, pendeteksian, dan audit internal yang baik dalam perusahaan. Untuk mencegah fraud harus meningkatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai macam-macam *fraud* yang ada. Salah satu cara pencegahannya adalah dengan perancangan Audit Berbasis Resiko yang dapat meminimalisir atau mencegah *Fraud* dapat terjadi.

PT. Generali Teknologi adalah perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi Listrik yang berlokasi di Jl. Arief Rahman Hakim No.91 (Ruko Klampis 21). PT. Generali Teknologi belum sama sekali menerapkan Audit Internal maupun Audit Berbasis Resiko yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan tidak adanya pengelolaan audit yang memadai maka kemungkinan munculnya resiko tidak dapat dicegah terlebih dahulu. Resiko yang dapat terjadi dalam perusahaan sangatlah banyak dan dapat berpotensi mengurangi laba yang menjadi tujuan utama dalam suatu perusahaan. PT. Generali Teknologi memiliki pembelian material dengan jumlah uang yang tidak sedikit. Pembelian material sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pekerja di lapangan yang bertumpu pada jumlah material yang di kirim ke lapangan. Pengiriman material ke lapangan yang tidak terkontrol akan menyebabkan berkurangnya *profit*. PT. Generali Teknologi merupakan *Subcon* dr beberapa Kontraktor listrik besar, lingkup pekerjaannya adalah pengerjaan alat-alat ke listrikan, alarm, detector, dan cctv. PT. Generali Teknologi mengambil kebutuhan-kebutuhan kabel dari berbagai macam supplier yang tentunya mencari harga terendah namun kualitas yang baik. PT. Generali Teknologi berdiri sejak tahun 2014, dikarenakan masih baru dalam bidang konstruksi listrik dan belum menerapkan Audit

Berbasis Resiko maka munculah celah untuk terjadi *fraud* yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Untuk menghindari tindakan *fraud* ini maka penulis ingin meneliti seberapa penting Audit Resiko ini harus diterapkan dalam perusahaan yang dapat terjadi dikaitkan dengan mencegah *Fraud* ini sendiri dapat muncul dalam perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Skripsi yang berjudul **“PERANCANGAN AUDIT BERBASIS RESIKO PADA FUNGSI PEMBELIAN DI PT. GENERALI TEKNOLOGI - SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana perancangan Audit Berbasis Resiko pada fungsi pembelian di PT. Generali Teknologi – Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui pentingnya perancangan Audit Berbasis Resiko pada PT. Generali Teknologi – Surabaya.
- b Untuk mengetahui fungsi dari perancangan Audit Berbasis Resiko dalam upaya pencegahan Fraud di bagian pembelian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan membandingkan dengan praktek langsung yang terjadi dalam perusahaan.
- b. Dapat memperoleh tambahan pengetahuan tentang pentingnya penerapan Audit Berbasis Resiko dalam perusahaan kecil maupun besar.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk melakukan perancangan Audit Berbasis Resiko dalam fungsi pembelian agar tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan perusahaan.
- b. Membantu mahasiswa untuk mengetahui cara terbaik dalam mengantisipasi adanya kecurangan dalam sebuah perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menyamakan persepsi tentang tema penelitian di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitiannya sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi elektrikal.
2. Yang menjadi objek penelitian adalah perancangan Audit Berbasis Resiko pada fungsi pembelian untuk mencegah terjadi Fraud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Resiko Audit

Risiko audit merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang auditor. Dimana penilaian risiko audit ini berada pada tahap perencanaan dalam proses audit. Risiko audit ini juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kelayakan sebuah perusahaan, bukti yang harus dikumpulkan serta berapa lama waktu yang akan digunakan untuk proses audit. Selain dari pada itu risiko audit ini dapat memberikan informasi dan proses audit yang efektif dan efisien. Berikut definisi audit menurut beberapa ahli:

Definisi risiko audit menurut Arens et al (2008:148) ialah:

“Risiko audit merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai, bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar, sedangkan dalam kenyataannya mengandung salah saji yang material.”

Menurut Tuanakotta (2013:89) risiko audit ialah:

“Risiko audit adalah risiko dimana auditor memberikan opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah sajiakan secara material”

Menurut Agoes (2012:148) resiko audit ialah:

“Resiko audit adalah resiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material”

Definisi-definisi resiko audit di atas dapat penulis simpulkan bahwa resiko audit merupakan resiko yang dapat dihadapi oleh setiap auditor dalam melaksanakan audit, dimana auditor akan salah memerikan opini terhadap suatu laporan keuangan. Seorang auditor mungkin akan memberikan opininya, namun pada kenyataannya dalam laporan keuangan perusahaan tersebut terjadi salah saji material dan kecurangan yang tidak dapat terdeteksi oleh seorang auditor, sehingga auditor terlewat akan kecurangan yang terjadi dalam suatu perusahaan.

2.1.2 Jenis-Jenis Resiko Audit

Resiko audit merupakan resiko yang tidak dapat dihindari oleh seorang auditor sekali pun. Kemungkinan terjadinya resiko tersebut selalu ada dalam kegiatan audit. Resiko audit ini identic dengan kesalah audit seorang auditor. Sekalipun resiko audit ini tidak dapat dihindari namun auditor tetap harus memperhatikan hasil auditnya. Ada beberapa jenis resiko yang harus diperhatikan oleh seorang auditor berikut jenis-jenis resiko yang dikemukakan beberapa ahli:

Menurut Tuanakota (2014:90-91) jenis-jenis resiko audit ialah:

1. *Inherent Risk* (Resiko Bawaan)

“*Inherent Risk* merupakan kerentanan suatu asersi (mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan) terhadap salah saji yang mungkin material, sendiri atau tergabung, tanpa memperhitungkan pengendalian terkait”

2. *Control Risk* (Resiko Pengendalian)

“*Control Risk* merupakan resiko bahwa salah saji bisa terjadi dalam suatu asersi (mengenai jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan) dan bisa material, sendiri atau tergabung dengan salah saji lainnya, tidak tercegah atau terdeteksi dan terkoreksinya pada eaktu oleh pengendalian intern entitas.”

3. *Detection Risk* (Resiko Pendeteksian)

“*Detection Risk* adalah resiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menekan resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, tidak akan mendeteksi salah saji yang bisa material, secara individu atau tergabung dengan salah saji lainnya.”

2.1.3 Definisi *Fraud*

Fraud merupakan suatu kondisi yang mungkin akan ditemui oleh auditor hampir di setiap perusahaan dalam pemeriksaan audit yang dilakukan. Auditor akan menemukan berbagai macam bentuk *fraud* yang dapat terjadi yang sebelumnya belum pernah auditor hadapi, tidak hanya itu auditor juga akan melihat berbagai

macam cara seseorang untuk melakukan kecurangan dalam perusahaan yang mungkin tidak mengira akan terjadi. Auditor dapat mempelajari karakteristik seseorang yang akan berpotensi melakukan *fraud* dalam sebuah perusahaan.

Berikut adalah definisi audit menurut beberapa ahli:

Definisi *fraud* menurut Albrecht (2010)

“*Fraud* adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan *fraud*”

Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) (2006):

“*Fraud* berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain.”

Menurut *Blaks Law Dictionary*:

“Kecurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau memaksakan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu”

Berdasarkan berbagai definisi diatas, *fraud* dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum dengan melegalkan segala cara agar dapat mencapai suatu tujuan dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan. Kecurangan dirancang untuk mendapat keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Menurut Karyono (2013:5) Kesimpulan dari unsur-unsur *Fraud* adalah:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Dilakukan oleh orang dari dalam dan luar perusahaan.
- c. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok.
- d. Langsung dan atau tidak langsung merugikan pihak lain.

2.1.4 Bentuk-Bentuk Fraud

Menurut Karyono (2014:17-25) bentuk Fraud terdiri dari:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Statement*)

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebenarnya (*over statement*) dan lebih buruk dari sebenarnya (*under statement*). Laporan keuangan *over stated* dilakukan dengan melaporkan asset dan pendapatan lebih besar dari yang sebenarnya. Kecurangan ini bertujuan:

- a Meningkatkan nilai kekayaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham, karena nilainya naik.
- b Untuk mendapatkan sumber pembiayaan atau memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan, dalam kaitannya untuk kredit perbankan atau kredit lembaga keuangan lain.
- c Untuk menggambarkan rentabilitas atau perolehan laba yang lebih baik.
- d Untuk menutupi ketidakmampuan dalam menghasilkan uang atau kas.
- e Untuk menghilangkan perspektif negatif pasar.
- f Untuk memperoleh penghargaan atau bonus karena kinerja perubahan baik.

Cara-cara untuk mewujudkan jenis kecurangan tersebut diatas antara lain dengan memasukkan dalam laporan keuangan:

- a. Penghasilan atau pendapatan fiktif (*Fictious revenue*)
- b. Penilaian akhir atas asset tidak tepat.
- c. Menyembunyikan kewajiban (*Concealed Liabilities*).
- d. Mencatat aktiva pasiva pendapatan dan biaya pada periode akuntansi yang tidak tepat (*Timing Deference*). Biaya pendapatan tahun berjalan digeser ke tahun sebelumnya atau sesudahnya. Sebaliknya pendapatan tahun lalu digeser ke tahun berjalan dan pendapatan tahun yang akan datang digeser ke tahun berjalan.
- e. Menyembunyikkan biaya antara lain dengan mengkapitalisasi biaya.
- f. Pengungkapan laporan keuangan yang tidak tepat (*Improrer Disclosures*) seperti tidak diungkapkannya kewajiban bersyarat

(*Contingence Liabilities*) atau kejadian-kejadian penting yang berpengaruh negative terhadap pos-pos laporan keuangan. Pada sisi lain kecurangan laporan keuangan dilakukan untuk menekan laba (*Revenue Understatment*) dalam rangka menghindari atau memperkecil pengenaan pajak penghasilan badan yang akan diuraikan pada uraian korupsi bidang perpajakan.

2. Kecurangan Penyalahgunaan Aset

Kecurangan penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*) terdiri atas kecurangan kas dan penyalahgunaan persediaan dan aset lainnya.

a. Kecurangan Kas

Kecurangan kas terdiri atas kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat (*Skimming*), kecurangan kas setelah dicatat (*Larceny*), dan kecurangan pengeluaran kas (*Fraudulent Disbursement*) termasuk kecurangan penggantian biaya (*Expense Disbursement Scheme*).

1) Kecurangan Penerimaan Kas

Pencurian terhadap penerimaan kas yang belum dicatat (*Skimming*):

- a) Pendapatan Negara tidak dilaporkan atau dicatat (*Unrecorded*) atau dilaporkan lebih kecil (*Understates*).
- b) Piutang dihapus padahal piutang tersebut sebetulnya tidak dihapus tetapi ditagih dan tidak dilaporkan (*Write off Schemes*).

- c) Pengambilan uang hasil penagihan untuk sementara waktu dengan menunda pencatatan penerimaannya (*Lapping Schemes*).

Pencurian yang sudah dicatat di pembukuan (*Cash Larency*) antara lain:

- a) Pencurian kas tunai (*Cash on Hand*)
- b) Pencurian kas di bank (*Cash in Bank*)
- c) Mencuri kas dengan membuat kesalahan perhitungan atau kesalahan pembukuan dengan sengaja.

2) Kecurangan Pengeluaran Kas (*Fraudulent Disbursement*)

Kecurangan penagihan (*Billing Schemes*), dengan memasukkan dokumen tagihan atau invoice pengadaan barang, sehingga tagihan lebih tinggi (*mark up*) atau tagihan fiktif dengan cara:

- a) Menciptakan rekanan fiktif melalui perusahaan papan nama (*Shell Company*)
- b) Melakukan pembayaran ganda atas pembayaran yang lebih tinggi kemudian diminta kembali secara pribadi kelebihan pembayaran tersebut (*Pay and Return*)
- c) Meninggikan tagihan dari rekaman (*Overbilling*)

Kecurangan penggantian biaya (*Expense Reimbursement Schemes*) adalah kecurangan pengeluaran kas dengan memanipulasi penggantian biaya antara lain dengan cara:

- a) Meninggikan biaya (*Overstated Expense*) dari yang sebenarnya dikeluarkan sehingga pengantian biaya yang diterima lebih tinggi, dari yang benar-benar dikeluarkan.
- b) Pengantian biaya atas biaya-biaya fiktif (*Fictitious Expense Scheme*) antara lain dengan cara membuat kwitansi palsu.
- c) Kecurangan penggantian biaya berulang-ulang (*Multiple Reimbursement*)

Kecurangan pembayaran gaji atau upah (*Payroll Scheme*) dengan cara memalsu dokumen pendukung pembayaran gaji atau upah berupa catatan waktu kerja atau memalsu informasi yang ada dalam catatan gaji atau upah serta menciptakan pegawai fiktif.

- b. Penyalahgunaan persediaan dan aset lain (*Inventory and Other Aset Misappropriation*)

Kecurangan persediaan barang dan aset lainnya terdiri dari dari pencurian (*Larency*) dan penyalahgunaan (*Misuse*). *Larency Scheme* dimaksudkan sebagai pengambilan persediaan atau batang di gudang karena penjualan atau pemakaian, untuk perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi pemngambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan gudang.

- 1) Penjualan Fiktif (*Fictitious Sell*) dengan cara:
 - a) Kolusi dengan pihak ketiga yang mengambil barang tapi tidak di proses (tanpa pembayaran)
 - b) Menjual dengan *discount* tidak wajar.

2) *Aset Requisition and Transfer Scheme* dengan cara:

- a) Pemindahan asset kelokasi lain dengan dokumen intern resmi, barang kemudian dicuri.
- b) Permintaan material untuk proyek jumlah yang diminta di mark up.
- c) Menciptakan proyek fiktif untuk mencuri material.
- d) Memalsu formulir permintaan barang.

3) Kecurangan pembelian dan penerimaan (*Purchasing and Receiving Scheme*) dilakukan dengan:

- a) Membeli barang yang tidak diperlukan.
- b) Pembelian asset kemudian dicuri.

4) Memalsukan penerimaan barang (*False Inventory Receive Recent*)

- a) Petugas penerima memalsukan catatan penerimaan (dicatat lebih kecil).
- b) Memalsukan penjualan dan pengapalannya (*False Sales & Shipment Scheme*).

- c) Dibuat dokumen penjualan palsu, pelaku mengirim ke pembeli fiktif.
- d) Catatan persediaan dipalsukan agar sama dengan fisiknya.

5) Membuat jurnal palsu, untuk menutupi ketekoran persediaan

- a) Debet: Harga pokok penjualan

Credit: Persediaan

b) Debet: Piutang

Credit: Persediaan

6) Menghapus Persediaan (*Inventory Write Off*)

a) Penghapusan persediaan tersebut tidak benar karena hanya untuk menutupi kekurangan stok.

b) Mempercantik penampilan fisik agar tampak barangnya lebih banyak (*Physical Padding*).

Kecurangan persediaan barang dan asset lainnya yang berupa penyalahgunaan (*Misue*) asset pada umumnya sulit untuk dikuantifikasikan akibatnya.

3. Korupsi

Kata korupsi (*Corruption*) berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dan penyimpangan kesucian. Pengertian korupsi bervariasi, namun secara umum dapat didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau public atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi terjadi pada organisasi korporasi swasta dan pada sector public atau pemerintahan.

Pada uraian berikut ini adalah bentuk korupsi di korporasi (perusahaan) sedangkan korupsi di pemerintahan diuraikan secara terpisah pada uraian berikutnya. Adapun bentuk korupsi tersebut terdiri atas hal-hal berikut ini:

1. Pertentangan kepentingan (*Conflict of Interest*)

Bentuk korupsi ini terjadi karena karyawan atau manajer mempunyai kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau transaksi bisnis pada organisasi dimana karyawan tersebut bekerja, kepentingan tersebut berlawanan dengan kepentingan organisasinya. Karena ada kepentingan berlawanan maka pelaku dapat melakukan kecurangan antara lain:

- a) Mengarahkan secara terus menerus untuk membeli barang ke perusahaannya.
- b) Mengarahkan spesifikasi teknis barang yang akan dibeli
- c) Membatasi persaingan dengan mengatur prakualifikasi dan memberikan informasi penting dan rahasia sehingga meskipun dilakukan tender, akan dimenangkan oleh perusahaannya.

2. Suap (*Bribery*)

Suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang pelunasan hutang, hiburan, fasilitas, keuntungan bisnis, janji-janji manis, pinjaman, dan sebagainya.

Bentuk suap terdiri atas komisi (*Kick Back*) dan imbalan karena kecurangan proses lelang (*Bid Rigging*)

- a) Komisi (*Kick Back*) terjadi karena ada penerimaan atau pemberian sesuatu untuk memengaruhi keputusan bisnis. Pada

kasus ini terjadi kolusi antara pegawai dengan rekanan (misalnya pada saat pembelian) kolusi tersebut; bisa dalam pembuatan faktur palsu, melakukan pembelian fiktif, atau membuat faktur yang di mark up (digelembungkan)

b) *Bid Rigging* (kecurangan untuk memenangkan lelang), dilakukan untuk memenangkan salah satu penawar dari beberapa penawaran yang ikut lelang. Bila kecurangan tersebut berhasil, penawar yang menang akan memberi sesuatu yang bernilai kepada panitia lelang. Dalam hal ini semua peminat diberi kesempatan ikut memasukkan penawaran, di balik itu ada kolusi atau persekongkolan antara penawar tertentu dengan panitia lelang. Penawar itulah yang dipilih menjadi pemenang, cara berkolusi antara lain dengan memberi spesifikasi teknis dan informasi penting lain yang bersifat rahasia kepada rekanan yang berkolusi.

3. Pemberian tidak sah (*Illegal Gravities*)

Pemberian tidak sah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang karena keputusan yang di ambil oleh seseorang. Keputusan itu berdampak memberi keuntungan kepada pemberi sesuatu yang bernilai tersebut. Beda dalam hal suap ialah bahwa keputusan yang diambil pada kecurangan ini tidak harus dipengaruhi sebelumnya.

4. Pemerasan Ekonomi (*Economic Ecortion*)

Pada bentuk korupsi ini, karyawan minta pembayaran dari rekanan (*vendor*) atas keputusan yang diambil yang menguntungkan rekanan (*vendor*) tersebut. Caranya dengan jalan menakut-nakuti dengan ancaman atau bujukan.

4. Kecurangan yang berkaitan dengan computer

Kecurangan yang berkaitan dengan computer (*Computer Fraud*) menurut Stanford Research International yang diungkap oleh G. Jack Balogna dalam bukunya *Forensic Accounting* diungkap mulai tahun 1958, kejahatan waktu itu dikelompokkan dalam:

- a) Perusakan komputer
- b) Pencurian informasi dan harta kekayaan
- c) Kecurangan keuangan atau pencurian kas
- d) Penggunaan atau penjualan jasa komputer secara tidak sah

Terjadi perkembangan kejahatan di bidang computer dan contoh tindak kejahatan yang dilakukan sekarang antara lain:

- a) Menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukkan data palsu
- b) Salah mem-posting atau mem-posting sebageian transaksi saja
- c) Memproduksi keluaran palsu, menahan, menghancurkan, atau mencuri keluaran

- d) Merusak program misalnya mengambil uang dari banyak rekening jumlah kecil-kecil
- e) Mengubah dan menghilangkan *master file*
- f) Mengabaikan pengendalian intern untuk memperoleh akses informasi rahasia
- g) Melakukan sabotase
- h) Mencuri waktu penggunaan komputer
- i) Melakukan pengamatan elektronik dari data pada saat dikirim.

Kejahatan komputer digolongkan dalam:

- a) *Input Scams* (perusakan masukan)
- b) *Throughput Scams* (perusakan proses)
- c) *Output Scams* (perusakan keluaran)
- d) *Input Scams* berupa memasukkan data yang salah atau curang ke dalam computer seperti data masukan diubah, dipalsu atau ditiru, ditingkatkan atau direndahkan, dihancurkan, sengaja dihilangkan dan dimodifikasi.

Pelaku kejahatan ini adalahh petugas *entry* data atau operator computer tanpa meninggalkan jejak dan perusakan dapat dilakukan seketika.

- e) Jaringan-jaringan yang ada dapat meningkatkan resiko. Jaringan-jaringan yang ada ditunjukan untuk meningkatkan kinerja computer namun rentan untuk tindak kejahatan. Informasi dapat dicuri melalui suatu sistem kerja dengan cara menyadapnya ke dalam tabel transmisi. Semakin banyak terminal, makin besar kesempatan untuk akses tidak sah ke computer pusat.

- f) Sistem komputer tidak dimengerti secara luas sejalan dengan perkembangan teknologi.
- g) Pengendalian intern kurang atau tidak ada atau tidak memadai. Hal ini disebabkan banyak analisis dan programmer komputer yang kurang memahami pengendalian akuntansi dan prinsip-prinsip umum pengendalian intern.
- h) Personel yang dipercaya mengesampingkan pengendalian. Kondisi ini dapat diatasi dengan pengendalian melekat oleh manajer ke dalam sistem dan meningkatkan kepuasan kerja para programmer dan petugas entry data.

2.1.5 Teori Penyebab Terjadinya Fraud

Setiap tindakan criminal, selalu didorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. *Fraud* dapat terjadi karena berbagai penyebab dan kemungkinan yang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan *fraud*. Berikut ini teori yang mendukung terjadinya *Fraud* dalam sebuah perusahaan atau organisasi.

Menurut Karyono (2013:8-10) Teori Segitiga Fraud terdiri dari tiga kondisi yaitu:

Gambar 2.1

Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*)

Tekanan (*Preasure*)

Kesempatan (*Opportunity*)

Pembenaran (*Rationalization*)

Sumber: Karyono (2013: 9)

1. Tekanan (*Preasure*)

Dorongan untuk melakukan fraud terjadi pada karyawan (*employee fraud*) dan oleh manajer (*manajemen fraud*) dan dorongan itu terjadi antara lain karena:

- a. Tekanan keuangan, antara lain berupa banyak hutang, gaya hidup melebihi kemampuan keuangan, keserakahan, dan kebutuhan yang tidak terduga.
- b. Kebiasaan buruk, antara lain kecanduan narkoba, judi, dan peminum minuman keras.
- c. Tekanan lingkungan kerja, seperti kurang dihargainya prestasi atau kinerja, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan.

- d. Tekanan lain, seperti tekanan dari keluarga untuk memiliki barang-barang mewah.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Di samping itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal. Menurut Steve Albrecht, ada beberapa factor yang dapat meningkatkan untuk melakukan fraud yaitu:

- a. Kegagalan untuk menetibkan pelaku kecurangan
- b. Terbatasnya akses terhadap informasi
- c. Ketidaktahuan, malas, dan tidak sesuai kemampuan pegawai
- d. Kurangnya jejak audit

3. Pembeneran (*Rationalization*)

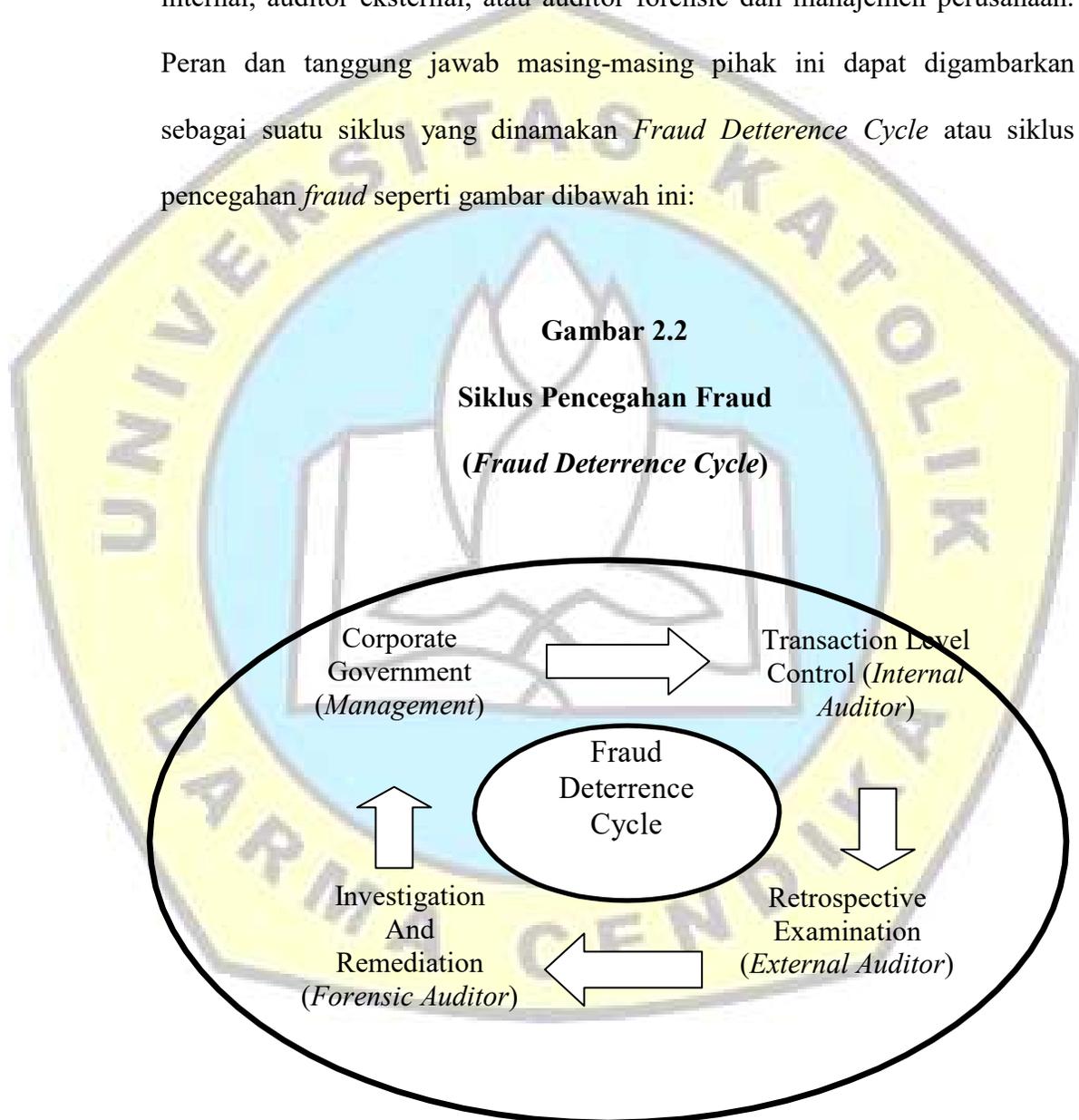
Pelaku kecurangan mencari pembeneran antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa atau wajar dilakukan oleh orang lain pula
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya
- c. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan

2.1.6 Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*

1. Pencegahan *Fraud*

Dalam mencegah dan mendeteksi serta menangani *fraud* sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait, antaranya yaitu akuntan baik sebagai auditor internal, auditor eksternal, atau auditor forensic dan manajemen perusahaan. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak ini dapat digambarkan sebagai suatu siklus yang dinamakan *Fraud Deterrence Cycle* atau siklus pencegahan *fraud* seperti gambar dibawah ini:



Sumber: Fitrawansyah (2014:15)

a. *Corporate Governance*

Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. *Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.

b. *Transaction Level Control Proses*

Transaction Level Control Proses yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.

c. *Retrospective Examination*

Retrospective Examination yang dilakukan oleh auditor eksternal diarahkan untuk mendeteksi *fraud* sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan. Peran auditor forensik menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangan laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.

Adapula pencegahan teori *Triangle fraud* menurut Karyono (2013:61-62) Menurut *Triangle Fraud* faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Untuk mencegahnya diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir sebab terjadinya yaitu:

a. Mengurangi Tekanan Situasional yang Menimbulkan Kecurangan

- 1) Hindari tekanan eksternal yang mungkin menggoda pegawai accounting untuk menyusun laporan keuangan yang menyesatkan.
- 2) Hilangkan hambatan operasional yang menahan kinerja keuangan yang efektif seperti pembatasan modal kerja, pembatasan persediaan.
- 3) Tetapkan prosedur akuntansi yang jelas dan seragam.
- 4) Hilangkan tekanan keuangan dengan penggajian yang memadai.
- 5) Ciptakan lingkungan kerja yang baik dengan menghargai prestasi kerja.

b. Mengurangi Kesempatan Melakukan Kecurangan

- 1) Peningkatan pengendalian baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun dalam pelaksanaannya.
- 2) Ciptakan catatan akuntansi yang akurat dan jelas dan berfungsi sebagai sarana kendali.
- 3) Pantau secara hati-hati transaksi bisnis dan hubungan pribadi pemasok pembeli.
- 4) Tetapkan pengamanan fisik terhadap aset dengan inventarisasi fisik secara berkala dan pengamanan lokasi atau tempat penyimpanan.

- 5) Lakukan pemisahan fungsi di antara pegawai sehingga ada pemisahan otorisasi penyimpanan dan pencatatan.
 - 6) Pelihara catatan personalia yang akurat dan lakukan pengujian latar belakang pegawai baru.
 - 7) Penetapan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku *fraud*.
 - 8) Tetapkan sistem penilaian prestasi kerja yang adil.
- c. Mengurangi Pembenaan Melakukan Kecurangan dengan Memperkuat Integritas Pribadi Pegawai.
- 1) Ada aturan perilaku jujur dan tidak jujur harus didefinisikan dalam kebijakan organisasi.
 - 2) Ada contoh perilaku jujur dari para manajer dan berperilaku seperti apa yang mereka inginkan.
 - 3) Ada aturan sanksi tugas dan jelas bila ada penyimpangan aturan bagi pelakunya.

2. Mendeteksi Fraud

Menurut Karyono (2013:91) deteksi fraud ialah:

“Deteksi fraud adalah suatu tindakan untuk mengetahui bahwa fraud terjadi, siapa pelaku, siapa korbannya, dan apa penyebabnya. Kunci pada pendeteksian fraud adalah untuk melihat adanya kesalahan dan ketidakberesan.”

Fraud pada hakekatnya tersembunyi dan pelakunya pada umumnya juga akan menyembunyikan jejaknya. Oleh karena itu pendeteksian fraud

juga tidak dapat dilakukan langsung dengan melihat jejak yang ditinggalkannya. Pendeteksian fraud dilakukan dengan mengidentifikasi tanda-tanda atau gejala terjadinya, kemudian di analisis apakah tanda-tanda itu dapat menunjukkan identifikasi awal terjadinya fraud. Gejala-gejala atau tanda-tanda terjadinya fraud dapat ditunjukkan dari pelaku individu pelaku, dari organisasi, dan dari luar organisasi. Banyak teknik pendeteksian fraud salah satunya adalah menurut Karyono (2013:93-94):

1. Pengujian Pengendalian Intern

Meliputi pengujian pelaksanaannya secara acak dan mendadak. Hal ini untuk mendeteksi fraud yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian intern yang ada tidak berfungsi secara efektif.

2. Dengan Audit Keuangan atau Audit Operasional

Pada kedua jenis audit itu tidak ada keharusan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengungkap adanya fraud, akan tetapi auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga fraud dapat terdeteksi.

3. Pengumpulan Data Intelejen

Pengumpulan data intelejen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Cara pendeteksian fraud ini dilakukan secara tertutup atau secara diam-diam mencari informasi tentang pribadi seseorang yang sedang dicurigai sebagai pelaku kecurangan.

4. Penggunaan Prinsip Pengecualian

Penggunaan prinsip pengecualian (*exception*) dalam pengendalian dan prosedur. Pengecualian dimaksud antara lain:

- a. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan atau dikompromikan.
- b. Transaksi-transaksi yang janggal.
- c. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun.
- d. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.

5. Dilakukan Kaji Ulang

Perlu dilakukannya kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi. Dalam hasil kaji ulang diperoleh penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan dan sasaran organisasi. Penyimpangan tersebut bukan karena adanya sebab yang wajar dari aktivitas bisnis yang lazim.

6. Pendekatan Reaktif

Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ita Megasari	Audit Berbasis Resiko Dalam Pengajuan Atas Pengendalian Intern Pada Siklus Pendapatan	Resiko tertinggi berasal dari factor internal itu sendiri. Setiap organisasi perlu mengelola risikonya dengan baik, agar resiko tersebut tidak merugikan dan mengancam kelangsungan hidup organisasi. Resiko ini dapat muncul timbul dari factor eksternal maupun internal. Resiko potensial muncul akibat lemahnya pengendalian intern pada siklus pendapatan.	Perbedaan dengan penelitian yang penulis ini buat adalah bedanya bidang jasa yang diteliti penelitian ini bergerak pada sektor jasa sedangkan yang diteliti oleh penulis pada bidang dagang, dan juga penelitian ini difokuskan pada pencegahannya bukan perancangan awal Audit Berbasis Resiko.
2	Airin Nisa Aldiani dan Armanto Witjaksono	Pengaruh Audit Internal Terhadap Pendeteksian dan Pencegahan Fraud (Kecurangan Akuntansi) (Suatu Studi Pada PT. KTM)	Auditor internal membantu manajemen dalam mendeteksi dan mencegah fraud di perusahaan yakni dengan aktif dalam mengontrol dan mengawasi apa	Perbedaan dengan penelitian yang penulis ini buat adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sehingga

			yang segang berjalan di perusahaan. Salah satu yang paling riskan adalah bagian keuangan dan bagian IT.	dikukur berdasarkan angka yang didapat. Penelitian ini tidak menyangkutkan fraud dengan audit resiko yang dapat terjadi hanya fokus pada fraud yang dapat terjadi pada perusahaan.
3	Rio Firmansyah Hardi	Audit Berbasis Resiko Pada PT. Petrokimia Gresik	Pelaksanaan Audit Berbasis Resiko harus berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan sesuai dengan keadaan waktu terjadinya transaksi atau kegiatan perusahaan. Memperbaiki kelemahan yang ada dalam perusahaan sangatlah penting untuk menunjang kelangsungan perusahaan untuk jangka waktu yang lama.	Perusahaan PT. Petrokimia Gresik sudah melakukan Audit Berbasis Resiko namun belum maksimal, sedangkan perusahaan tempat penulis melakukan penelitian belum melaksanakan Audit Berbasis Resiko di awal sebelum terjadinya transaksi yang sangat penting dalam

				pengawasan pembelian dan mencegah terjadinya Fraud pada saat transaksi telah berjalan.
--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

2.3 Kerangka Pemikiran

Perancangan Audit Berbasis Resiko sangat penting dalam aktivitas perusahaan, ada tiga macam dari Audit Berbasis Resiko yaitu Resiko Bawaan, Resiko Pengendalian dan Resiko Pendeteksian. Ketiga resiko ini apabila tidak diperhatikan maka akan menyebabkan resiko dalam perusahaan akan muncul. Fraud adalah salah satu dampak yang dapat timbul apabila ketiga resiko itu tidak diperhatikan dan tidak diterapkannya Audit Berbasis Resiko itu sendiri.

Menurut Albrecht (2002) *Fraud* adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan fraud yang meliputi cara yang mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik dan tidak jujur yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk mengetahui pengertian di atas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.

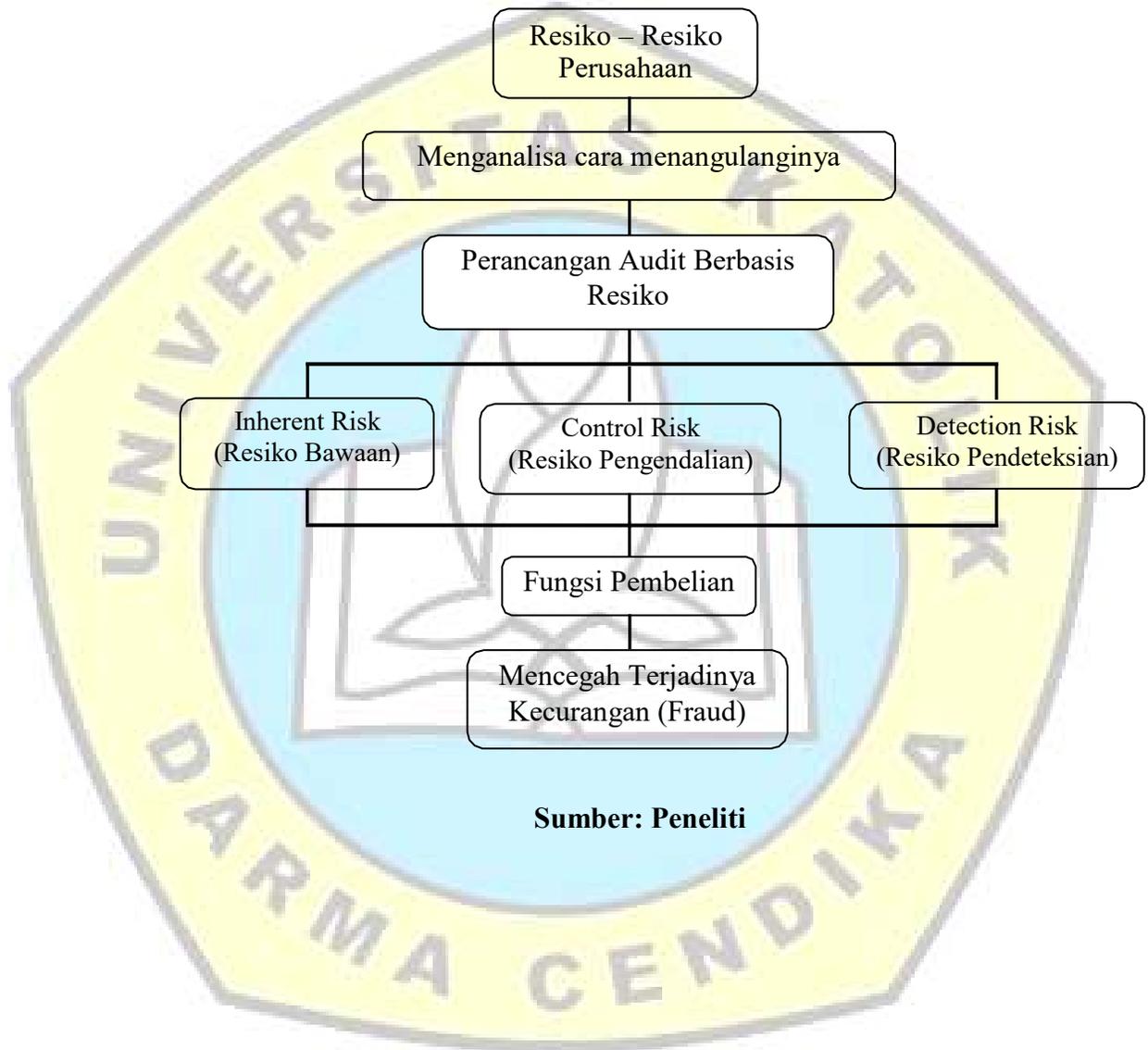
Fraud dapat dihindari dengan melakukan pendeteksian resiko yang maksimal dalam perusahaan. Menurut Tuannakota (2013:91) *Detection Risk* (Resiko Pendeteksian) adalah resiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menekan resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima, tidak akan mendeteksi salah saji yang bisa material, secara individu atau tergabung dengan salah saji lainnya. Jadi prosedur audit ini dibuat untuk menekan resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Dalam menyusun prosedur audit ada pertimbangan mengenai potensi resiko karena dengan salah menerapkan prosedur audit maka akan memperbesar potensi resiko yang dapat terjadi dalam perusahaan.



2.4 Kerangka Konseptual

Daftar Gambar 2.3

Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti